

PERAN DINAS SOSIAL KOTA SAMARINDA DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA SAMARINDA

Syamsurya
NPP. 29.0043

*Asdaf Kota Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: syamsuryaaaa@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research is entitled "The Role of Social Service in Training the Homeless Street Children and Beggars in Samarinda City". The training program for the homeless street children and beggars is a program conducted by the local government in overcoming problems of PMKS (Social Welfare Problems), especially for the homeless street children and beggars in Samarinda City. **Purpose:** This study aims to find out and analyze the role of the Social Service in training the homeless street children and beggars, the inhibiting factors in the development of Maratua Island, as well as the efforts that can be made by departement social fostering beggars and homeless street children in the city of Samarinda, East Kalimantan province. **Method:** In doing the research, descriptive qualitative is applied as the research methods with the documentation and interview as the data collection techniques. The interview is conducted with related parties in training homeless street children and beggars, such as the Head of the Social Service and regional apparatus who are related to the training of homeless street children and beggars. **Result:** Based on the results of the study, the efforts made by the Social Service in the training of homeless street children and beggars have been carried out, but it has not been maximized, considering that there are still many perpetrators of street children and beggars who have not been caught. **Conclusion:** The role of the social service in fostering homeless street children and beggars has not played a good role because the implementation of the coaching program has not been maximized, there are still many perpetrators of street children who are homeless and beggars who are still not screened which disturb public order, the limitations of the social service include budget, human resources and facilities. . The inhibiting factors in the implementation of fostering homeless street children and beggars in the city of Samarinda include internal factors, namely the lack of human resources, quantity of apparatus resources, infrastructure and budget, as well as external factors, namely the lack of understanding and community participation.

Keywords: Role, Training, Homeless Street Children and Beggars, Samarinda City

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berjudul “Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis di Kota Samarinda”. Pembinaan anak jalanan gelandangan dan pengemis merupakan program yang dibuat pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan PMKS (Penderita Masalah Kesejahteraan Sosial) khususnya pada anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan gelandangan dan pengemis, untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor penghambat dinas sosial dalam pembinaan anak jalanan pengemis dan gelandangan di kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur. **Metode:** Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi dan wawancara. Penulis melakukan kegiatan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam Pembinaan anak jalanan gelandangan dan pengemis, seperti Kepala Dinas Sosial serta perangkat daerah yang berkaitan untuk pembinaan anak jalanan gelandangan dan pengemis. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak jalanan gelandangan dan pengemis sudah banyak yang dilakukan, tetapi belum maksimal dilihat masih banyaknya pelaku anak jalanan dan pengemis yang belum terjaring. **Conclusion:** Peran Dinas sosial dalam pembinaan terhadap anak jalanan gelandangan dan pengemis, berperan belum baik karena pelaksanaan program pembinaan belum maksimal, masih banyaknya pelaku anak jalanan gelandangan dan pengemis yang masih belum tersaring yang mengganggu ketertiban umum, keterbatasan yang dimiliki Dinas sosial meliputi anggaran, sumber daya manusia dan fasilitas. Faktor faktor penghambat dalam penyelenggaraan pembinaan anak jalanan gelandangan dan pengemis di kota Samarinda diantaranya berasal dari faktor internal yakni kurangnya sumber daya manusia, kuantitas sumber daya aparatur, infrastruktur dan anggaran maupun faktor eksternal yakni kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Pembinaan, Anak Jalanan gelandangan dan pengemis, Kota Samarinda

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan peran Dinas sosial Kota Samarinda dalam pembinaan anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda yaitu secara umum PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Samarinda) yang terjadi di Samarinda karena berbagai faktor, salah satunya kemiskinan yang meningkat pesat. Selain itu dampak negatif dari pembangunan ekonomi yang tidak merata. tingkat arus urbanisasi yang ada di kota Samarinda cukup tinggi. Faktor pendidikan yang tidak merata juga mempengaruhi tingkat masalah sosial yang ada di Kota Samarinda. Adapun secara khususnya yang menjadi masalah penting yakni pada pelaku gelandangan dan pengemis (Gepeng). Pelaku Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Samarinda sangat

mengganggu ketertiban umum di Kota Samarinda dan hingga saat ini masih menjadi keresahan bagi masyarakat Samarinda.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks peran Dinas Sosial maupun dalam pembinaan anak jalanan gelandangan dan pengemis. Penelitian pertama oleh Harsinar (2017) tentang *Pelaksanaan Fungsi Dinassosial dalam Perlindungan Anak jalanan di Kota Makassar*. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor pelaksanaan fungsi dinas sosial dan keefektifan dalam Perlindungan Anak jalanan di Kota Makassar. Penelitian kualitatif ini menunjukkan hasil bahwa dengan adanya faktor pendukung Dinas sosial kota Makassar berupa regulasi yang jelas, maka pelaksanaan perlindungan anak jalanan berjalan dengan baik. Tingkat keefektifan pelaksanaan regulasi tersebut sangat baik dilihat dari kerja sama antar Dinas sosial dengan lembaga terkait. selanjutny ialah penelitian oleh Wulandari Asri (2017) mengenai *Strategi Penanganan Anak jalanan di Dinas sosial dan Olahraga Kota Semarang*. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan menganalisis strategi penanganan anak jalan oleh Disospora Kota Semarang. Adapun hasil dari penelitian ini ialah Penangan anak jalanan di Kota Semarang oleh Disospora yaitu dengan dua cara preventif berupa pemberian bantuan dan sosialisasi untuk anak jalan maupun orang tua. Cara represif berupa penjarangan atau razia serta memberikan anak jalanan serta pembinaan dan bantuan langsung.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni serupa peran Dinas Sosial Kota Samarinda dalam pembinaan anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto mengenai teori peran yang terdiri atas 2 dimensi yaitu hak dan kewajiban.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas sosial Kota Samarinda dalam pembinaan anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Dinas sosial Kota Samarinda dalam pembinaan anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dengan yang dihasilkan pada waktu penelitian serta dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan lalu ditafsirkan dengan konflik yang telah dibahas sebelumnya.

Penulis mengumpulkan data dengan data yang bersumber dari data primer yaitu wawancara, observasi serta data tentang informan dan sekunder melalui ahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, serta lain sebagainya, data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan yang terdiri Kepala dinas Syariat Islam, Kepala Bidang

Dakwah, Kasie Syariat Islah, Tokoh Masyarakat, serta perwakilan masyarakat kota, pingir kota, serta masyarakat yang terkena sanksi atau belum terkena sanksi. Adapun analisisnya menggunakan pendapat Miftah Thoha mengenai teori persepsi. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Dinas Sosial Kota Samarinda dalam pembinaan anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda menurut Soerjono Soekanto mengenai teori peran yang terdiri atas 2 dimensi yaitu hak dan kewajiban. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Hak

a. Ketersediaan Anggaran

Pengaruh ketersediaan anggaran terhadap jalannya program yang ada pada suatu OPD tentu sangat berpengaruh besar untuk kelancaran suatu program kegiatan. Anggaran yang memadai sangat berpengaruh pada jalannya program kegiatan. Ketersediaan anggaran juga menjadi faktor utama yang mendukung kinerja aparatur Dinas sosial Kota Samarinda dalam merealisasikan pembinaan terhadap anjal gepeng. Ketersediaan anggaran yang diberika kepada Dinas sosial untuk merealisasikan pembinaan terhadap anjal gepeng dari Pemerintah Daerah sangatlah minim sehingga membuat program ini menjadi tidak efektif. Ini merupakan salah satu faktor yang membuat Dinas sosial sulit untuk merealisasikan program pembinaan tanpa adanya dukungan dana. Sampai saat ini untuk menyiasati minimnya anggaran Dinas sosial Kota Samarinda harus lebih bijak untuk membagi dana dalam merealisasikan program program prioritas.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia yang baik yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat menjalankan tugas dengan baik hingga maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini SDM yang ada di Dinas Sosial yakni terdiri dari 46 orang pegawai serta 15 orang Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) dan 22 orang Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH). Selain itu setelah melihat latar belakang SDM, masih banyak yang pendidikannya belum sesuai dengan bidangnya. Salah satunya dengan tidak ada atau kurang adanya pegawai pada bidang tertentu seperti psikologi dan kesehatan. Serta SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial saat ini banyak yang sudah berumur cukup tua, untuk menjaga semangat serta nilai sosial dalam hal ini Dinas Sosial sangat membutuhkan pegawai dalam usia muda atau produktif.

c. Ketersediaan Fasilitas

Sebagai perangkat daerah, Dinas sosial Kota Samarinda juga memiliki sarana dan prasaran untuk menunjang program pembinaan terhadap anjal gepeng. Berikut merupakan ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas sosial:

Tabel 1.
Sumber Daya Aset Dinas Sosial Kota Samarinda

No	Nama Barang	Satua n	Jumla h
1.	Tanah	3	3
2.	Gedung Kantor Permanen	2	2

3.	Gedung Kantor Permanen (UPTD Panti)	1	1
4.	Kendaraan Roda Empat (Mobil)	1	1
5.	Mobil Tangki	1	1
6.	Pick Up	1	1
7.	Speed Boat	2	2
8.	Perahu Penumpang	1	1
9.	Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor)	5	5
10.	Laptop	9	9
11.	Printer	26	26
12.	PC Unit	7	7
13.	Meja Komputer	1	1
14.	C P U	2	2
15.	Monitor	1	1
16.	Power Suplay	6	6
17.	TV Monitor	2	2
18.	Monitor	1	1
19.	LCD	3	3
20.	Note Book	6	6
21.	Meja Rapat	7	7
22.	Meja Komputer	1	1
23.	Meja Biro	12	12
24.	Kursi Tangan	4	4
25.	Kursi Lipat	7	7
26.	Kursi Putar	10	10
27.	Kursi Kerja Non Struktural	7	7
28.	Kursi Besi / Metal	8	8

Sumber : Dinas sosial Kota Samarinda.

Pada implementasinya, fasilitas yang dimiliki Dinas sosial banyak yang memiliki kondisi kurang baik dan tidak bisa dipergunakan denganmaksimal. Terbatasnya fasilitas yang membuat banyak pegawai di Dinsos ini harus bekerja dengan lebih keras agar pekerjaannya bisa dapat diselesaikan. Seperti contoh yang bisa kita lihat saat ini, sempitnya kantor dinas yang dimiliki Dinas sosial membuat tidak adanya gedung untuk melaksanakan pelatihan keterampilan. Sehingga untuk melakukan pemberdayaan anak jalanan gelandangan hanya bisa dilakukan di UPT Yayasan Panti Sosial Anak Harapan di Kota Samarinda. Sehingga dapat diketahui bahwa fasilitas guna menunjang hal ini sangat terbatas ketersediaannya.

3.2. Kewajiban

a. Program

Program Pembinaan anak jalanan telah dilaksanakan oleh Dinas sosial semenjak dibentuk Dinas sosial itu sendiri, ditambah dengan adanya peraturan daerah yang mengatur harusnya pembinaan tersebut dapat lebih jelas serta sesuai dengan kebijakan berlaku. Karena dalam pelaksanaannya selama ini

bahwa program pembinaan masih belum sepenuhnya efektif danmaksimal walaupun dengan adanya kebijakan terkait pembinaan anak jalanan. Berikut data jumlah anak jalanan dan pengemis yang terjaring di Kota Samarinda.

Tabel 2.
Jumlah Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis di Kota Samarinda

No	Jenis	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Anak jalanan	206	220	230
2	Gelandangan dan Pengemis	106	115	120
Jumlah		312	335	350

Sumber: Dinas Sosial Kota Samarinda

Tabel 3.
Jumlah Anak jalanan Gelandangan dan Pengemis berdasarkan pembagian Kecamatan di Kota Samarinda tahun 2021

Kecamatan	Jumlah			Total
	Anak jalanan	Gelandangan	Pengemis	
Smd Kota	22	7	28	57
Smd Ilir	83	-	-	83
Smd Ulu	51	5	-	56
Smd Utara	13	28	-	41
Sei. Pinang	33	8	12	53
Sambutan	-	-	-	-
Sei. Kunjang	-	-	14	14
Smd Sebrang	31	2	-	33
Loa Janan Ilir	-	-	26	26
Palaran	-	-	-	-

Sumber : Dinas sosial Kota Samarinda

Ddata yang ada merupakan data Anak jalanan dan pengemis yang terjaring. Walaupun jikadilihat dari presentase jumlah anak anak yang ada di kota samarinda dibandingkan anak jalanan yang ada, fenomena anak jalanan dilihat langsung dan sangat mengganggu kertertiban masyarakat. Hingga saat

inimasih banyak anak jalanan dan pengemis yang dapat dilihat secara langsung di jalan jalan kota Samarinda.

Program Pembinaan Anak jalanan Gelandangan dan Pengemis yang dilaksanakan Dinas sosial mengacu kepada Kebijakan Wali Kota KotaSamarinda No 07 Tahun 2017. Pada kebijakan tersebut diatur tentang tujuan, bentuk pembinaan dan pemberdayaan, dan larangan:

1. Tujuan Pembinaan

Sesuai dengan pasal 3, Kebijakan Daerah ini mempunyai tujuan untuk:

- a) memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat
- b) menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang harus dihormati
- c) menjaga sifat kekeluargaan
- d) mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat
- e) menciptakan perlakuan yang adil dalam mewujudkan kehidupanbermasyarakat
- f) meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai
- g) mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat

2. Bentuk Pembinaan dan Pemberdayaan

Pada Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2017, terdapat 3 bentuk pembinaan yaitu Pembinaan Pencegahan, Pembinaan Lanjutan dan Rehabilitasi Sosial.

- Pembinaan Pencegahan meliputi;

- a) Pendataan
- b) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- c) Sosialisasi

- Pembinaan lanjutan, meliputi;

- a) Pendekatan awal
- b) Pengungkapan masalah
- c) Pendampingan sosial dan penjangkauan
- d) Perlindungan
- e) Penampungan sementara
- f) Rujukan
- g) Pengendalian sewaktu waktu

Pembinaan lanjutan dilakukan secara terencana dan berkesinambungan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi

- Rehabilitasi Sosial dilakukan dengan sistem panti atau di luar panti, dimana diluar panti dilaksanakan dengan pembinaan melalui keluarga

Kegiatan Pemerdayaan Pengemis, Anak jalanan dan gelandangan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pelatihan kewirausahaan
- b) Pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga
- c) Pembentukan kelompok usaha bersama
- d) Pengembangan kelompok usaha bersama

e) Pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif

3. Larangan

Menurut Bab VII Peraturan Daerah No 07 Tahun 2017 Laranganyang dimaksud:

- a) Pengemis, Gelandangan dan Anak jalanan dilarang untuk memintaminta di jalan raya dan sarana umum kota Samarinda
- b) Masyarakat dilarang memberikan baranga/uang kepada pelakupengemis dan anak jalanan
- c) Dilarang mengeksploitasi anak jalanan dan gelandangan untukmelakukan kegiatan yang tidak sesuai norma di tempat umum

b. Koordinasi

Pelaksanaan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemisoleh Dinas sosial Kota Samarinda juga membutuhkan koordinasi kepada beberapa pihak dalam membantu Dinas sosial melancarkan program pembinaan. Pihak yang melakukan koordinasi dengan Dinas sosial diantaranya adalah Satpol PP Kota Samarinda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepolisian. Koordinasi yang dibentuk yaitu dalam melakukan razia dan pengawasan, dengan begitu pelaksanaan Dinas Sosial juga dibantu oleh Satpol PP yang merupakan OPD yang mempunyai wewenang untuk menegakkan peraturan daerah. Dalam pelaksanaannya koordinasi yang dibentuk oleh Dinas sosial sudah cukup baik khususnya koordinasi kepada Satpol PP untuk melakukan razia atau penjaringan kepada pelaku anjal gepeng di kota Samarinda. Kegiatan razia atau penjaringan merupakan kegiatan rutin yangdilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial.

c. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahap awal yang dilakukan Pemerintah Daerah sebelum menegakkan peraturan dengan tujuan masyarakat dapat mengerti maksud dan tujuan kebijakan yang dijalankan dan dapat melaksanakan tanggung jawab, hak serta kewajiban dari Pemerintah Daerah yang diatur pada peraturan daerah. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembinaan Anak jalanan Gelandangan dan Pengemis dilakukan bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas pemberdayaan perempuan anak. Sosialisasi dilakukan di tiap kecamatan yang ada di Kota Samarinda dan tempat yang menjadi gepeng melakukan kegiatannya. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada orangtua/keluarga dengan cara memberi edukasi dasar tentang pola asuh anak agar tidak ada lagi anak yang menjadi anak jalanan. Namun dalam pelaksanaannya, pemahaman yang didapat oleh masyarakat belum sepenuhnya merata. Sehingga partisipasi masyarakat masih sangatkurang untuk membantu masalah anak jalanan dan pengemis ini. Pemberian sanksi kepada masyarakat juga sulit untuk direalisasikan mengingat masih banyak masyarakat yang mengira apa yang mereka berike pengemis merupakan perbuatan baik.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sosial yaitu berupa razia dan pemberian surat perjanjian terhadap pelaku anak jalanan gelandangan dan pengemis untuk tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kegiatan masyarakat, selain itu Dinas Sosial mendata pelaku untuk mengungkap masalah dan penyebab pelaku permasalahan sosial melakukan

kegiatan - kegiatan yang meresahkan kemudian dari data tersebut gelandangan bisa dipanggil untuk diberi pembinaan dan pelatihan. Dinas Sosial juga memberikan pembinaan mental sosial bagi orang tua anak untuk menyadari pentingnya hak kebutuhan dasar anak jalanan mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka dan memberikan pemahaman tentang tugasnya sebagai anak.

e. Penindakan

Kegiatan penindakan ini dilaksanakan ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat dan disepakati. Penindakan perlu dilaksanakan dengan bijaksana agar aturan yang ada dapat terus berlaku dan berjalan. Dalam melakukan penindakan Dinas sosial melakukan dengan cara memberi surat peringatan bagi yang terjaring razia dan memberikan penampungan sementara untuk menunggu keluarga, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Surat peringatan yang diberikan merupakan bentuk peringatan untuk tidak mengulangi kegiatan sebagai anak jalanan maupun pengemis yang meresahkan masyarakat, dan jika didapat melakukan kegiatan berulang walau sudah diberi surat peringatan, Dinas sosial berhak untuk membawa pelaku Anjal Gepeng ke pengadilan untuk diberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

3.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang mempengaruhi peran Dinas sosial Kota Samarinda Dalam Pembinaan Anak Jalan Gelandangan dan Pengemis

a. Faktor Pendukung

1. Terbentuknya Koordinasi dengan instansi pemerintah daerah lainnya. Koordinasi yang dijalin oleh Dinas sosial dengan instansi seperti Satuan Polisi Pamong Praja maupun pihak Kepolisian membantu tugas Dinas sosial dalam menjalankan penertiban anak jalanan gelandangan dan pengemis. Sehingga dalam hal ini meringankan beban Dinas sosial untuk melakukan Pembinaan Anak jalanan.
2. Adanya UPT Panti Sosial Anak Harapan yang masih peduli terhadap masalah anak jalanan yang ada di Kota Samarinda.

b. Faktor Penghambat

1. Kualitas sumber daya manusia, dilihat dari latar belakang pendidikan pegawai Dinas sosial banyak yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya dan belum ada ketentuan mengenai standar mutu yang harus dilakukan aparatur saat melakukan pembinaan.
2. Kuantitas sumber daya manusia, kurangnya jumlah aparatur, yang mana jumlah aparatur yang ada saat ini hanya berjumlah 14 orang pada bidang Rehabilitasi Sosial. Permasalahan ini tentu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembinaan sehingga mempengaruhi optimalisasi kinerja Dinas sosial Kota Samarinda dalam memberikan pembinaan kepada para anak jalanan.
3. Ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana, belum tersedia atau sarana dan prasarana dalam kondisi yang kurang baik sehingga tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Tidak tersedianya atau kurangnya sarana dan prasarana mengakibatkan terhambatnya kinerja aparatur dalam menjalankan fungsi utamanya. Hal ini terlihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas kerja yang terbatas dan tidak memadai sehingga sangat menghambat terselenggaranya pelayanan. Misalnya, gedung kantor Dinas sosial yang sempit dan tidak ada gedung untuk pelaksanaan pelatihan serta pembinaan. Hal lain yang masih menjadi kendala adalah kurangnya

pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas sosial Kota Samarinda dan Panti Sosial Sehati. Selain itu, tidak ada alat peraga yang tersedia untuk digunakan dalam praktik pelatihan. Serta tidak tersedianya kendaraan dinas yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila ada keperluan mendadak terkait pelaksanaan tugas aparatur Dinas sosial Kota Samarinda.

4. Ketersediaan anggaran yang dimiliki Dinas sosial yang dikarenakan anggaran pada setiap OPD telah dilakukan pemotongan sehingga pelaksanaan pembinaan anak jalanan menjadi terhambat. Dinas sosial Kota Samarinda harus menyalurkan hal tersebut dengan membagi dana yang tersedia secara bijak agar program kegiatan prioritas yang telah direncanakan dapat direalisasikan seluruhnya.
5. Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat. Pemahaman masyarakat harus bisa mengerti jika memberikan uang kepada pengemis hanya membuat mereka semakin malas untuk bekerja. Kurang meratanya sosialisasi tentang pemahaman anak jalanan gelandangan dan pengemis kepada masyarakat membuat masyarakat selalu memanjakan pengemis untuk tidak bekerja. Masyarakat juga kurang berpartisipasi dalam mengatasi masalah anak jalanan gelandangan dan pengemis yang pada akhirnya juga meresahkan ketertiban masyarakat.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Anak jalanan gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang terjadi di lingkungan serta dalam kehidupan bermasyarakat. Akibat dari adanya anak jalanan gelandangan dan pengemis dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat selain itu juga mereka mengganggu ketertiban umum seperti berjalan-jalan dipinggir-pinggir jalan dengan sampah berserakan, menggunakan fasilitas umum dengan tidak benar yakni dijadikan tempat tinggal dan lain-lain. Dengan adanya hal tersebut diperlukan kebijakan yang mengatur agar tidak adanya lagi anak jalanan gelandangan dan pengemis. Di Kota Samarinda anak jalanan gelandangan dan pengemis menjadi permasalahan umum yang mana permasalahan ini langsung ditangani oleh Dinas Sosial Kota Samarinda sebagai Lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menangani hal tersebut. Sejalan dengan perjalanan Dinas Sosial dalam menangani permasalahan anak jalanan dan gelandangan, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembinaan Anak jalanan Gelandangan dan Pengemis yang mana dalam hal ini Dinas Sosial Kota Samarinda bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas pemberdayaan perempuan anak. Namun dalam pelaksanaannya walaupun kegiatan penertiban anak jalanan dan gelandangan telah rutin dilaksanakan namun masih saja ada anak jalanan dan gelandangan serta pengemis yang ada di Kota Samarinda itu membuktikan masih belum efektifnya peran Dinas Sosial dalam penanganan permasalahan ini tidak seperti halnya dalam penelitian oleh Harsinal (2017) bahwasanya tingkat keefektifan pelaksanaan regulasi tersebut sangat baik dilihat dari kerja sama antar Dinas sosial dengan lembaga terkait di Kota Makassar. Dalam penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis selain dengan regulasi yang telah ditetapkan yakni perlu adanya strategi yang dibuat guna keefektifan dalam penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis, seperti halnya yang terjadi di Kota Semarang oleh Wulandari Asril (2017). Adapun strategi yang dilakukan yakni ada dua acara dengan cara preventif serta represif.

Harapan kedepannya peran Dinas Sosial sebagai Lembaga dinas terkait yang menangani permasalahan ini dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaannya diperlukan juga kerja sama antar masyarakat serta Lembaga lainnya agar terciptanya koordinasi demi terwujudnya daerah atau wilayah yang bebas dari anak jalanan gelandangan dan pengemis.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan berkaitan peran Dinas Sosial Kota Samarinda dalam pembinaan anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda menurut pendapat pendapat Soerjono Soekanto mengenai teori peran bahwa persepsi Peran Dinas sosial dalam pembinaan terhadap anak jalanan gelandangan dan pengemis, berperan belum baik karena pelaksanaan program pembinaan belum maksimal, masih banyaknya pelaku anak jalanan gelandangan dan pengemis yang masih belum tersaring yang mengganggu ketertiban umum, keterbatasan yang dimiliki Dinas sosial meliputi anggaran, sumberdaya manusia dan fasilitas. Faktor faktor penghambat dalam penyelenggaraan pembinaan anak jalanan gelandangan dan pengemis di kota Samarinda diantaranya berasal dari faktor internal yakni kurangnya sumber daya manusia, kuantitas sumber daya aparatur, infrastruktur dan anggaran maupun faktor eksternal yakni kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto mengenai teori peran.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa peran Dinas Sosial Kota Samarinda dalam pembinaan anak jalanan gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto . 2001. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Grafindo Persada
- Soekanto. 2002. *Teori Peran*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Thoha. Miftah. (2010:52). *Perilaku Organisasi*. Rineka Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul, 2012. *Analisis Kebijakan (Formulasi Ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara
- Todaro, M.P. 2006. *Economic Development. Seventh Edition*, New York, Addition Wesley Longman, Inc.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suparlan, Parsudi. 1978. *Gambaran tentang suatu masyarakat gelandangan yang sudah menetap*. Jakarta: FSUI

Akbaruddin, Syaifful. 2018. "Kesejahteraan Sosial Melalui Program Permakanan Oleh Dinas Sosial Di Kota Surabaya." *Doctoral Dissertation Universitas Airlangga* 1–7.

Cut Zamharira. 2019. "Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh." 53(9):1689–99.

Islam, Thalha Alhamid dan Budur Anufia Ekonomi, and 2019 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong. n.d. "INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA." 148:148–62.

Khoirunnisa, Khoirunnisa, Edith Ratna, and Irawati Irawati. 2020. "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan." *Notarius* 13(2):546–56. doi: 10.14710/nts.v13i2.31073.

Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, Affiifi. 2014. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN (ANJAL) DI KOTA SAMARINDA." *Paper Knowledge Toward a Media History of Documents*.

Ninla Elmawati Falabiba. 2019. "STRATEGI PENANGANAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG."

Praja, Selvia Junita, Margaretha Rumbekwan, and Muhammad Ibrahim. 2020. "Evaluasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Ppmk) Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 10(1):268–81. doi: 10.33701/jiwbp.v10i1.1132.

Roosmawati. 2021. "Hasil Sensus Penduduk 2020 Jumlah Penduduk Kabupaten Malang Hasil Sensus Penduduk 2020." *Badan Pusat Statistik Kota Samarinda*(2):1–5.

Sekarini, Arimbi Yuniza Dian. 2018. "Analisis Kinerja Aparatur Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal MSDM* 5(2, Desember):175–94.

Suyitno, Harsinar Mustaring Imam. 2013. "Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Dalam Perlindungan Anak Jalanan Di Kota Makassar." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):107–18.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Upaya Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis
<https://dinsosamarindakota.wordpress.com/>
<https://kaltim.bps.go.id/>
<https://samarindakota.bps.go.id/>
<https://sidata.kaltimprov.go.id/>